

EVALUASI

ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TAHUN 2020 DAN INDIKATOR PRASYARAT PUG



ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

Adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas keberhasilan dan prakarsa dalam kaitannya dengan pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.

KONDISI PENCAPAIAN APE PROVINSI SULAWESI SELATAN



PEROLEHAN KATEGORI APE PROV. SULSEL

Tahun 2012 : Kategori Madya

Tahun 2013 : Kategori Utama

Tahun 2014 : Kategori Utama

Tahun 2015 : Kategori Utama

Tahun 2016 : Kategori Utama

Tahun 2018 : Kategori Mentor

KAB/KOTA SULSEL PENERIMA APE TAHUN 2018

No	Kab/Kota	Kategori APE
1	Sidrap	Utama
2	Luwu Timur	Utama
3	Sinjai	Utama
4	Makassar	Madya
5	Maros	Madya
6	Bone	Madya
7	Bulukumba	Madya
8	Bantaeng	Madya
9	Soppeng	Madya
10	Wajo	Madya
11	Parepare	Madya
12	Luwu	Madya
13	Pangkep	Pratama
14	Luwu Utara	Pratama
15	Selayar	Pratama

ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA



KATEGORI APE



MENTOR

Adanya inovasi/
untuk mempercepat
pencapaian tujuan



UTAMA

Tersedia 7 prasyarat
dan berfungsi dengan
baik : sudah melembaga dan
menjadi budaya.
Tersistem, menjadi IKU, dampak
dirasakan.



MADYA

Ketersediaan
7 prasyarat
Berfungsinya prasyarat :
dilaksanakan sebagaia
n besar unit/SKPD/LM



PRATAMA

Ketersediaan 7 Pras
yarat PUG

TUJUAN PEMBERIAN APE



- Evaluasi pelaksanaan PUG
- Mendorong (motivasi dan stimulasi) pelembagaan PUG
- Meningkatkan pemerataan pemahaman PUG di K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
- Advokasi kepada Pimpinan K/L dan Pimpinan Pemerintah Daerah
- Pemberian *reward* (penghargaan) kepada K/L dan Pemerintah Daerah
- Mendapatkanj data basis tentang pelaksanaan PUG

KOMPONEN EVALUASI PUG

Prasyarat PUG

- Komitmen
- Kebijakan
- Kelembagaan
- Sumberdaya
- Alat
- Data terpilah
- Peran masyarakat



- Tersedia.
- Diketahui
- Berfungsi (digunakan).

Pelaksanaan PUG

- Perencanaan (PRG)
- Penganggaran (ARG)
- Pelaksanaan PUG (pemahaman pelaksana)
- Evaluasi (ada audit/verifikasi)



- Dilaksanakan
- Sesuai standar (aturan)
- Konsisten
- Merata di SKPD

DASAR PENILAIAN DAN PEMBERIAN APE

- Nilai absolut yang berasal dari pemenuhan indikator (isian berdasarkan aplikasi)
- Hasil verifikasi Internal KPP PA
- Penilaian berdasarkan proses pelembagaan PUG di KL dan Daerah (konfirmasi dan dialog di lapangan)

TAHAPAN

- TAHAP PERSIAPAN
 - Penyusunan indikator
 - Uji coba indikator
 - Pengembangan aplikasi
 - Sosialisasi ke K/L dan Pemerintah Daerah
- TAHAP PELAKSANAAN
 - Pengisian form (input data) dari K/L dan Pemerintah Daerah
 - Verifikasi Internal KPP PA
 - Penetapan nominasi
 - Konfirmasi ke Lapangan
- TAHAP EVALUASI/PENILAIAN HASIL
 - Penetapan penerima APE

JUMLAH INDIKATOR

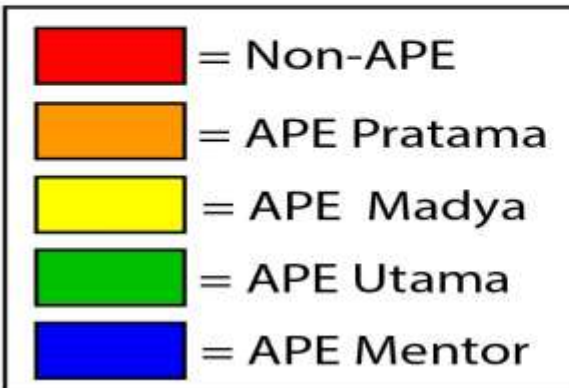
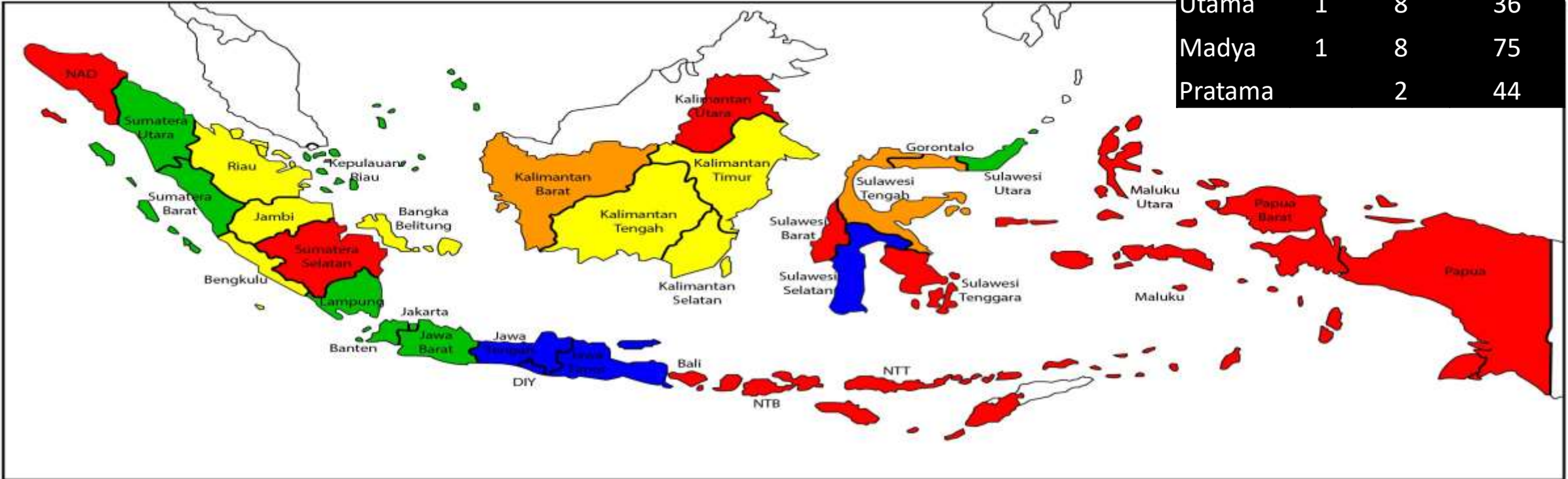
NO	KELEMBAGAAN	K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
1	Komitmen	8	8	8
2	Kebijakan	3	5	5
3	Kelembagaan	5	6	6
4	Sumberdaya	6	9	9
5	Data & system informasi	6	9	9
6	Metode/tool	4	4	4
7	Jejaring (peran masyarakat)	3	4	4
	Jumlah	34	45	45
	PELAKSANAAN	K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
A.	Kebijakan	7	5	4
	Program & kegiatan	3	5	4
	Fasilitasi	-	6	-
B	Kelembagaan dan Pelayanan	2	6	7
C	Anggaran	2	2	3
D	Peran masyarakat dan Dunia Usaha	5	6	6
	Jumlah	19	30	24

KATEGORI PENERIMA APE

- Kategori PRATAMA
- Kategori MADYA
- Kategori UTAMA
- Kategori MENTOR

Peta Sebaran APE 2018 di Provinsi

Kategori	K/L	Provinsi	Kab/Kota
Mentor	6	4	4
Utama	1	8	36
Madya	1	8	75
Pratama		2	44



KONDISI INDIKATOR PUG SULAWESI SELATAN 2018

NO	ASPEK	PROGRESS TAHUN 2018 (Mentor)	TARGET CAPAIAN	
			2020	2022
1.	Komitmen	Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Mentor	Mentor
2.	Kebijakan	- RPJMD/RKPD responsif gender - Renja responsif gender 45 Renstra OPD RG responsif gender 4 KUA/PPAS responsif gender 7 RKA OPD responsif gender		
3.	Kelembagaan PUG	- POKJA PUG melibatkan secara aktif 45 OPD - Focal Point di 45 OPD		
4.	Sumberdaya	- Perencana terlatih dan bersertifikat di 45 OPD, Inspektur Pembantu terlatih 1 dan Auditor 14, Fasilitator bersertifikat 66 org, Champion Gender : 17 - Jumlah anggaran responsif gender: Rp 3,177,144,500		
5.	Data Terpilah	- Profil Gender dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan tersedia : Statistik Gender dan Anak, Daerah dalam Angka datanya sudah terpilah (10 data) 45 OPD yang memiliki data terpilah, 45 OPD yang masuk dalam forum data		
6.	Alat Analisis	Tersedia Pedoman Teknis pelaksanaan PUG, Pedoman Audit yang responsif gender, Modul Pelatihan PPRG, Gender Analysis Pathway, PROBA, Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)		
7.	Peranserta Masyarakat	- PUSPA aktif dengan melibatkan 47 lembaga - Lembaga yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PP: 39 LM, 5 PT, 27 dunia		

TUGAS DRIVER PROVINSI = MEMASTIKAN PREDIKAT MENTOR TETAP DIPEGANG OLEH SULSEL

Rencana Intervensi Yg Diharapkan dari Tim Driver

1. BAPELITBANGDA PROVINSI

- mengkoordinir Bappeda Kab/Kota selaku Ketua Pokja agar mengaktifkan Pokja PUG kab/kota dan mengkoordinir langsung pengisian indikator APE di kab /kota . Buat surat edaran ke kab/kota dan lakukan pertemuan berkala untuk memantau kemajuan kab/kota.
- Karena yg dievaluasi adalah apa yg dilakukan pada tahun 2018- Juni 2020, maka perlu membuat dokumen pendukung yg seharusnya ada seperti : Surat edaran ke OPD provinsi unt menyusun renstra, renja, dan rka responsif gender, SK Tim Asistensi RKA Responsif Gender (Tahun 2018,2019,2020) (sesuai permendagri ttg pelaksanaan PUG di daerah dan Perda PUG Sulsel)
- Himpun hasil asistensi RKA responsif gender
- Bersama DP3A melakukan identifikasi Renstra dan Renja OPD responsif gender
- Aktifkan focal poin PUG di Bappeda

2. BPKD PROVINSI

- Buat surat edaran penyusunan penganggaran yg responsif gender, dan memasukkan poin PPRG di dalam Pergub Pengelolaan APBD (tahun 2018,2019, 2020) (sesuai permendagri ttg pelaksanaan PUG di daerah dan Perda PUG Sulsel)
- Buat SK Tim Asistensi RKA Responsif Gender (Tahun 2018,2019,2020)
- Himpun bukti asistensi RKA Responsif Gender
- Buat surat edaran ke kab/kota agar BPKD Kab/kota melakukan hal yg sama
- Aktifkan focal poin PUG di BPKD

3. INPEKTORAT

- Buat SK Pengawasan Pelaksanaan PUG (bisa secara khusus maupun reguler) (Tahun 2018,2019,2020) (sesuai permendagri ttg pengawasan dan permen pppa)
- Himpun bukti pengawasan PUG /PPRG di OPD provinsi
- Buat surat edaran ke kab/kota agar Inspektorat Kab/kota melakukan hal yg sama
- Aktifkan focal poin di Inspektorat

TUGAS DRIVER PROVINSI = MEMASTIKAN PREDIKAT MENTOR TETAP DIPEGANG OLEH SULSEL

Rencana Intervensi Yg Diharapkan dari Tim Driver

4. DP3A DALDUK KB

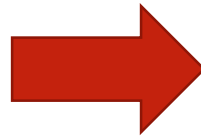
- Melakukan advokasi dan mendampingi kab/kota dalam pengisian dokumen APE kab/kota
- Mendampingi OPD provinsi dalam penyusunan PPRG dan Renstra OPD responsif gender bersama BAPELITBANGDA
- Melakukan bimbingan teknis bagi focal poin PUG OPD
- Mengkoordinir dokumen APE dari seluruh OPD

5. BPMD

- Buat surat edaran ke kab/kota tentang penyusunan RPJMDes yg Responsif Gender
- Buat surat edaran ke kab/kota tentang pemanfaatan dana desa yg memperhatikan kebutuhan anak dan perempuan sesuai permendesa ttg pengelolaan dana desa
- Melakukan pertemuan bimbingan teknis bagi aparat desa terkait PPRG desa
- Mengembangkan percontohan desa responsif gender di bbrp kab /kota (sudah ada percontohan di kab Maros , desa Sambueja)

EVALUASI PUG 2020

**Penekanan pada kualitas
seluruh dokumen
terutama ARG**



Konten Materi :

A. Indikator prasyarat PUG (Output):

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Kelembagaan
4. Sumber daya
5. Data terpilah dan SIM
6. Alat analisis
7. Peran Serta Masyarakat

B. Indikator pelaksanaan PUG (Outcome) :

1. Kebijakan dan program
2. Penganggaran
3. Kelembagaan dan pelayanan
4. Peran Serta Masyarakat

Pada level apa
dilakukan evaluasi
tahunan PUG?

Bag A

Bag B

NO	Prasyarat awa	Proses	Output	Outcome	IKU
1	Komitmen	1. Sos/Adv; 2. Workshop	1. Jakum: UU, Perda, Pergub/bup, 2. Jakop: SE, ST, KepGub/Bup	1. Peraturan per UU an yg responsif gender; 2. Kegiatan Responsif gender; 3. Anggran Responsif gender; 4. Pelembagaan PUG & pelayanan 4. Dukungan PT, LM dan dunia usaha	1. IPM; 2. IPG; 3. IDG; 4. % TKA 5. %TKP; 6. % TPPO
2	Kebijakan dan Program	1. Pelatihan; 2. Bintek; 3. Seminar	1. Dok Can: RPJMD, RKPD, Renstra, renja 2. Dok Anggaran: KUA/PPAS, RKA		
3	Kelembagaan PUG	1. Rakor; 2. Workshop; 3. Capacity building	1. Unt PPPA daerah 2. POKJA 3. Fokal Point, 4. RAD		
4.	Sumber Daya	1. Pelatihan; 2. Bintek;	1. Personil (Jlh SDm yang terlatih) 2. Dana & Fasilitas		
5.	Data & Sis Informasi	1. Bintek; 2. Advokasi; 3. Monev	1. Buku statistik yang terpilah 2. Profil gender 3. Tersedianya SIM		
6	Instrumen/Tool	1. Worksop; 2. Seminar	1. Alat anlysis 2. Modul & panduan		
7.	Civil society	1. Sos/Advokasi; 2. KIE	1. Jejaring 2. Control 3. Partnership.		



DASAR PELAKSANAAN PUG DAN PPRG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Inpres No. 9 tahun 2000 ttg PUG dlm Pemb Nasional	Perpres No. 18/20020 RPJMN 2020-2024	Permendagri No. 15 tahun 2008	Permendagri No. 67 tahun 2011
Gubernur/Kepala daerah/Bupati/walikota	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah	Pemda wajib susun keb/prog/kegiatan pembangunan berperspektif gender ke dalam RPJMD, RenstraSKPD, Renja SKPD.	Pemda wajib susun keb/prog/kegiatan pembangunan yang responsif gender ke dalam RPJMD, RenstraSKPD, Renja SKPD.
PUG sesuai dg bid tus dan kewenangannya	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;	Pasal 5, susun didasarkan analisis gender (GAP)	Analisis dituangkan Dalam GBS
Secara bersama-sama atau sendiri menetapkan kebijakan demi trlaksananya Inpres		Badan/Dinas/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender	Pasal 8 SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender

DASAR PELAKSANAAN PUG DAN PPRG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Inpres No. 9 tahun 2000 ttg PUG dlm Pemb Nasional	Perpres No. 18/20020 RPJMN 2020-2024	Permendagri No. 15 tahun 2008	Permendagri No. 67 tahun 2011
Gubernur/Kepala daerah/Bupati/walikota	Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.	Pasal 6 (1)Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD berperspektif gender (2)Renja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.	Pasal 6 1)Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender. 2)Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/walikota.



Review Indikator

INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN PUG

-
- 1. Kelembagaan PUG
(7 Prasyarat PUG)**
 - 2. Outcome/ Hasil
Pelaksanaan PUG**
-

I. INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG DI DAERAH

Prasyarat	Indikator	Ukuran
1. Kebijakan	1.1. Kebijakan Daerah ttg PUG daerah	Perda PUG di daerah;
		PerGub/PerBup/Walkot ttg PUG di daerah SKGub/PerBup/Walkot ttg PUG di daerah
	1.2. Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/KaOPD	• Instruksi Kepala daerah ttg PPRG; • SE Sekda ttg pelaksanaan PUG/PPRG
	1.3. Rencana pencapaian PUG di masing- masing OPD	RAD PUG, Road Map PUG, Renja Pokja PUG dan SE Sekda atau Ka Bappeda ttg target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD

Prasyarat	Indikator	Ukuran
2. Komitmen	2.1. Dokumen perencanaan (RPJMD)	Renstra Provinsi Sulawesi Selatan memuat:
		- Adanya dasar hukum PUG;
		- Adanya data terpilah;
		- Visi & misi;
		- Program dan kegiatan yg mendukung PUG;
		- Adanya indikator gender
	2.2. Renstra dan Renja OPD	Persentase Renstra OPD yang memuat:
		- Adanya dasar hukum PUG;
		- Adanya data terpilah;
		- Visi & misi;
		- Program dan kegiatan yg mendukung PUG;
		- Adanya Indikator Gender
	2.3. Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS

Prasyarat	Indikator	Ukuran
3. Kelembagaan	3.1. Unit organisasi yang menangani PUG di daerah	Es 3, Es 2, Non Es
	3.2. Adanya Pokja PUG di daerah;	Peraturan/SK tentang POKJA dari Kepala daerah;
	3.3. Focal point di masing-masing OPD;	• Jumlah OPD yang mempunyai Surat Penunjukan Focal Point dari Kepala OPD • Persen OPD yang mempunyai focal point
	3.4. Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG

Prasyarat	Daerah	
	Indikator	Ukuran
4. Sumber Daya	4.1. Perencana yang mahir	Jumlah perencana OPD yang mendapatkan sertifikat
	4.2. Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor yang mendapat sertifikat
	4.3. Anggaran Fasilitas di Daerah	• Jumlah Alokasi Anggaran fasilitas PUG • % Anggaran fasilitas PUG terhadap Anggaran Dinas PP-PA
	4.4. Jumlah Fasilitas di Daerah	• Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat • Ratio fasilitator terhadap jml Kabupaten + OPD
	4.5. Jumlah Gender Champion	• Jumlah orang yg memenuhi kriteria

Prasyarat	Daerah	
	Indikator	Ukuran
5. Data dan system informasi	5.1. Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat
	5.2. Statistik gender/Profil gender daerah;	Adanya profil gender daerah
		Adanya Daerah dalam angka terpilah;
	5.3. Data terpilah di masing-masing OPD;	Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin
	5.4. Mekanisme/sistem informasi;	Ada mekanisme/system informasi;

Prasyarat	Indikator	Ukuran
6. Metode/ Tool	6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah;
	6.2. Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG di daerah;
	6.3. Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah
	6.4. Pedoman Audit yang responsive gender	Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah;
	6.5. Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan
		Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu;
		Jumlah jenis bahan KIE utk promosi PUG

Prasyarat	Indikator	Ukuran
7. Peran serta masyarakat dan jejaring	Jumlah LM, PSW/G, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsive gender	LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG;
		Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksanaan PUG;
		Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah
		Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah

II. INDIKATOR OUTCOME/HASIL PELAKSANAAN

Output	Indikator	Ukuran
1. Kebijakan, program dan kegiatan yang RG	1.1. Kebijakan Daerah yang responsif gender	Perda yang responsif gender yang masih berlaku - Perda ASI - Perda KTR dll
	1.2. Program Pembangunan Daerah yang responsif gender	• Jumlah program yang responsif gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir • Persen terhadap semua program
	1.3. Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender yang dilaksanakan	Jumlah GBS kegiatan di OPD dalam 2 tahun terakhir

Output	Indikator	Ukuran
2. Kelembagaan	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dengan anggaran Provinsi	Jumlah dan persentase Kab/Kota yang difasilitasi
	Jumlah Daerah lain yang belajar PUG di Kab/Kota ini	Jumlah Kab/Kota
	Jumlah P2TP2A berstandar UPT PPA	Jumlah P2TP2A terstandarisasi
	Kantor OPD yang mempunyai ruang Day Care/Laktasi	Jumlah Kantor yang mempunyai Ruang Day Care/Laktasi
3. Anggaran	ARG	- Jumlah anggaran Pemda yang RG - Persen ARG terhadap seluruh anggaran
		Jumlah program/kegiatan yang mengikuti LM/PT/dunia usaha

Output	Indikator	Ukuran
4. Peran serta Masyarakat	Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsive gender	Jumlah kajian/penelitian yang dilakukan LM/PSW/dunia usaha ttg gender atau PUG dalam pembangunan
		Jumlah Pelatihan/Advokasi PPRG yang melibatkan LM/PT/dunia usaha;
		Jumlah program/kegiatan yang mengikuti LM/PT/dunia usaha

TERIMA KASIH

